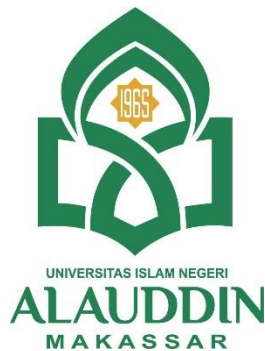


MAKALAH

PEMBENTUKAN KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA:

DINAMIKA PERDAGANGAN, DIPLOMASI, DAN TRANSFORMASI SOSIAL



OLEH:

MUHAMMAD FARID WAJDI

NIM. 80100225107

STUDI PASCASARJANA PROGRAM DIRASAH ISLAMİYAH

KONSENTRASI SEJARAH PERADABAN ISLAM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara serta faktor-faktor yang melatarbelakangi transisi kekuasaan dari corak Hindu-Buddha menuju Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah kritis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kerajaan Islam di Indonesia tidak terjadi melalui satu pola tunggal, melainkan melalui integrasi jalur perdagangan maritim, perkawinan politik antara pedagang Muslim dengan bangsawan lokal, serta peran sentral para ulama dalam melakukan pribumisasi ajaran Islam. Kerajaan Samudera Pasai muncul sebagai pionir entitas politik Islam di abad ke-13, yang kemudian diikuti oleh dominasi Kesultanan Malaka sebagai pusat emporium. Di Jawa, runtuhnya Majapahit memberikan ruang bagi berdirinya Kesultanan Demak yang mengombinasikan kekuatan maritim dan legitimasi keagamaan melalui dukungan Wali Songo. Transformasi ini tidak hanya mengubah struktur pemerintahan dari konsep *Dewaraja* menjadi *Sultan*, tetapi juga menciptakan identitas kebudayaan baru yang bersifat sinkretis. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sangat ditentukan oleh kemampuan para penguasa dalam mengadaptasi nilai-nilai Islam ke dalam tatanan sosial-budaya lokal, sehingga menciptakan stabilitas politik yang mampu bertahan hingga masa kolonialisme Eropa.

Kata Kunci: Kerajaan Islam, Nusantara, Sejarah Islam, Jalur Perdagangan, Transformasi Politik.

ABSTRACT

This article aims to analyze the process of formation and development of Islamic kingdoms in the Indonesian archipelago and the factors underlying the transition of power from Hindu-Buddhist patterns to Islam. The research method used is the critical historical method, which includes heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results show that the formation of Islamic kingdoms in Indonesia did not occur through a single pattern, but through the integration of maritime trade routes, political marriages between Muslim traders and local nobility, and the central role of ulama in the indigenization of Islamic teachings. The Samudera Pasai Kingdom emerged as a pioneer of Islamic political entities in the 13th century, followed by the dominance of the Malacca Sultanate as an emporium center. In Java, the collapse of Majapahit provided space for the establishment of the Demak Sultanate, which combined maritime power and religious legitimacy through the support of the Wali Songo. This transformation not only changed the government structure from the concept of Dewaraja to Sultan but also created a new syncretic cultural identity. This article concludes that the success of the formation of Islamic kingdoms in the archipelago was largely determined by the ability of rulers to adapt Islamic values into the local socio-cultural order, thereby creating political stability that persisted until the era of European colonialism.

Keywords: Islamic Kingdoms, Nusantara, Islamic History, Trade Routes, Political Transformation.

BAB I

PENDAHULUAN

Transisi Nusantara dari era Hindu-Buddha menuju era Islam merupakan salah satu fragmen paling krusial dalam historiografi Indonesia. Proses ini tidak terjadi melalui penaklukan militer besar-besaran seperti yang terjadi di wilayah Timur Tengah atau Afrika Utara, melainkan melalui proses penetrasi damai (*penetration pacifique*).

Islam datang ke Nusantara bukan ke dalam ruang hampa budaya, melainkan ke tengah masyarakat yang telah memiliki tatanan sosial-politik yang mapan di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia merupakan hasil dialektika antara jaringan perdagangan internasional, perkawinan diplomatik, dan pergeseran orientasi spiritual masyarakat agraris dan maritim.

Sejarah Islam di Nusantara merupakan salah satu transformasi sosial-budaya paling signifikan dalam Sejarah Asia Tenggara. Proses pembentukan kerajaan Islam di Nusantara secara umum mengikuti pola yang disebut sebagai "Islamisasi dari Atas" dan "Islamisasi dari Bawah".

Nusantara terletak di jalur sutra laut yang menghubungkan Tiongkok, India, dan Arab. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab mendirikan komunitas di Pelabuhan-pelabuhan penting. Keberhasilan ekonomi para pedagang ini memberikan pengaruh politik yang besar kepada penguasa lokal.

Banyak bangsawan lokal yang menikahkan putri mereka dengan pedagang Muslim kaya atau ulama. Hal ini menciptakan hubungan kekerabatan yang mempercepat konversi elit keraton ke Agama Islam. Para Ulama dan pengembara sufi memainkan peran krusial dengan menyebarkan Islam melalui pendekatan yang adaptif terhadap tradisi lokal. Di Jawa, peran **Wali Songo** sangat dominan dalam memadukan ajaran Islam dengan seni wayang, gamelan, dan sastra sehingga mudah diterima oleh masyarakat yang masih kental dengan budaya Hindu-Buddha.

BAB II

MASUKNYA ISLAM KE NUSANTARA

Sebelum membahas terbentuknya kerajaan, penting untuk memahami jalur masuknya Islam ke Nusantara dan pengaruhnya tersebut. Dalam Historiografi modern, dikenal beberapa teori utama tentang Masuknya Islam ke Nusantara, yaitu:

1. Teori Gujarat. Teori ini menyatakan Islam datang dari wilayah India pada abad ke-13. Kelebihannya adalah adanya bukti kesamaan nisan (seperti nisan Sultan Malik as-Saleh) dengan model Gujarat.
2. Teori Mekkah (Arab). Teori ini menegaskan bahwa Islam masuk sejak abad ke-7 langsung dari tanah Arab. Teori ini didukung oleh keberadaan permukiman Arab di Barus (Sumatera Utara) dan peran mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia.
3. Teori Persia dan Tiongkok. Teori ini menekankan pada pengaruh tradisi Syiah dan peran laksamana Cheng Ho dalam menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa.

Bagi sejarawan, teori-teori ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan dilihat sebagai gelombang yang saling melengkapi dalam membentuk basis massa sebelum akhirnya muncul kekuatan politik formal berupa kesultanan.

Perubahan dari kerajaan Hindu ke Islam membawa perubahan struktural dalam masyarakat Nusantara, diantaranya terkait (1) Konsep Kepemimpinan. Jabatan raja yang sebelumnya dianggap sebagai titisan dewa (*Dewaraja*) berubah menjadi *Khalifatullah* (wakil Allah di bumi) atau Sultan yang memimpin umat. (2) Hukum dan Keadilan. Penggunaan hukum syariat mulai diperkenalkan, meskipun dalam praktiknya sering dipadukan dengan hukum adat lokal. (3) Seni dan Arsitektur. Munculnya bentuk masjid dengan atap tumpang (meru) yang merupakan adaptasi dari arsitektur pura/candi, menunjukkan proses asimilasi yang damai.

Pembentukan kerajaan Islam pertama selalu dimulai dari kota-kota pelabuhan. Secara geografis, wilayah yang bersentuhan pertama kali dengan Islam adalah pesisir Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Kerajaan Samudera Pasai (Abad ke-13) di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama yang diakui secara luas dalam catatan sejarah. Kekuatan Pasai terletak pada kontrolnya terhadap komoditas lada dan perannya sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Hubungan diplomatik dengan Dinasti Mamluk di Mesir dan Kesultanan Delhi di India menunjukkan bahwa pembentukan kerajaan Islam di Nusantara sejak awal sudah bersifat kosmopolitan.

Di Pulau Jawa, pembentukan kerajaan Islam berkaitan erat dengan melemahnya otoritas pusat Majapahit. Proses ini merupakan contoh nyata dari konstruksi sosial baru di mana para pedagang muslim di pesisir utara Jawa (Pesisiran) mulai memiliki kekuatan ekonomi yang melampaui aristokrasi pedalaman. Kesultanan Demak, yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15, adalah kerajaan Islam pertama di Jawa.

Secara umum, terdapat tiga pola utama dalam pembentukan kerajaan Islam di Indonesia, yaitu: Pertama, Melalui Pola Perkawinan. Para Pedagang muslim yang kaya menikah dengan putri-putri bangsawan lokal. Hal ini memberikan akses ekonomi kepada pribumi dan akses status sosial kepada pedagang. Kedua, Pola Dakwah Urban. Islam menyebar di pusat-pusat kota perdagangan. Ketika raja memeluk Islam, seluruh struktur birokrasi dan rakyat mengikuti (*top-down*), namun tetap diiringi dengan dakwah kultural (*bottom-up*). Ketiga, Pola Legitimasi Baru. Para raja menggunakan gelar "Sultan" atau "Khalifatullah" untuk mendapatkan legitimasi yang lebih luas di dunia internasional, menggantikan konsep "Dewa-Raja" dalam tradisi Hindu-Buddha.

Pembentukan kerajaan Islam mengubah tatanan sosial Nusantara secara fundamental. Hal ini karena Islam memperkenalkan konsep kesetaraan di depan Tuhan, yang meskipun tidak menghapus kasta secara total di lapangan, namun memberikan mobilitas sosial yang lebih baik dibandingkan sistem kasta yang kaku. Hukum Islam kemudian diintegrasikan ke dalam hukum adat (seperti pepatah Minangkabau: *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*). Penggunaan huruf Arab-Melayu (Jawi/Pegon) memicu ledakan karya sastra dan penulisan sejarah (historiografi) lokal.

BAB III

KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM UTAMA DI NUSANTARA

1. Kerajaan Samudera Pasai (Abad ke-13)

Samudera Pasai di Aceh diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Nazimuddin al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir, namun penguasa pertamanya yang terkenal adalah Marah Silu yang bergelar Sultan Malik as-Saleh (wafat 1297).

Proses Pembentukan: Berawal dari penggabungan dua desa, Samudera dan Pasai. Karena lokasinya di pintu masuk Selat Malaka, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan internasional. Konversi Sultan Malik as-Saleh menandai legitimasi formal Islam dalam struktur kekuasaan.

Peran: Menjadi pusat studi Islam pertama dan perantara penyebaran Islam ke Malaka dan Jawa.

2. Kesultanan Malaka (Abad ke-15)

Didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran dari Majapahit yang melarikan diri ke Semenanjung Malaya. Setelah memeluk Islam, ia berganti nama menjadi Sultan Iskandar Syah.

Proses Pembentukan: Malaka berkembang dari desa nelayan menjadi emporium dunia. Pengakuan Islam oleh sultan bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pedagang Muslim dan perlindungan dari Dinasti Ming (Tiongkok) terhadap ancaman Siam.

Peran: Malaka menjadi "Vatikan-nya Asia Tenggara" dalam hal penyebaran bahasa Melayu dan agama Islam.

3. Kesultanan Demak (Abad ke-15 - ke-16)

Demak adalah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Didirikan oleh Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V (Raja Majapahit terakhir) dengan seorang putri dari Tiongkok yang telah memeluk Islam.

Proses Pembentukan: Seiring melemahnya otoritas pusat Majapahit, wilayah-wilayah pesisir utara Jawa (Gresik, Tuban, Jepara) yang dihuni komunitas Muslim mulai memisahkan diri. Dengan dukungan Wali Songo, Raden Patah mendirikan Demak sebagai pusat kekuatan politik baru yang akhirnya meruntuhkan dominasi Majapahit pada 1527.

Peran: Demak menjadi pangkalan militer untuk mengusir Portugis di Malaka (ekspedisi Adipati Unus) dan pusat penyebaran Islam ke pedalaman Jawa.

4. Kesultanan Banten dan Cirebon

Kedua kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah). Cirebon merupakan pintu masuk Islam di Jawa Barat, sedangkan Banten dikembangkan untuk menguasai jalur perdagangan lada di Selat Sunda.

Proses Pembentukan: Melalui diplomasi dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa dari kekuasaan Pajajaran (Hindu) oleh Fatahillah (panglima Demak), kekuasaan Islam di pesisir barat Jawa pun mapan.

5. Kesultanan Mataram Islam (Abad ke-16 - ke-18)

Berbeda dengan Demak yang berbasis maritim, Mataram Islam yang didirikan oleh Sutawijaya (Panembahan Senopati) berbasis agraris di pedalaman Jawa (Yogyakarta-Solo).

Proses Pembentukan: Mataram muncul setelah runtuhnya Kerajaan Pajang. Di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram mencapai puncak kejayaannya dengan menyatukan hampir seluruh tanah Jawa dan melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia.

Karakteristik: Terjadi sinkretisme yang kuat antara tradisi keraton Jawa dengan nilai-nilai Islam, menciptakan identitas budaya "Islam-Jawa".

6. Kesultanan Gowa-Tallo (Makassar)

Kerajaan ini merupakan kekuatan maritim terbesar di Indonesia Timur. Raja Gowa, Daeng Manrabia, memeluk Islam pada 1605 dan bergelar Sultan Alauddin. Proses Islamisasi di Makassar

merupakan salah satu yang paling menarik karena sangat inklusif. Makassar menjadi pelabuhan transito internasional yang melindungi para pedagang Melayu, Jawa, hingga Eropa. Konsep "Satu Raja Dua Rakyat" (Gowa dan Tallo) menunjukkan bahwa Islam mampu menyatu dengan struktur politik dualistik lokal tanpa menghancurkannya.

Islam masuk melalui dakwah ulama asal Minangkabau (Dato Ribandang). Kekuatan militer dan perdagangan Makassar yang tangguh membuat mereka menjadi pusat transit rempah-rempah yang menentang monopoli Belanda.

Tokoh Terkenal: Sultan Alauddin, Sultan Malikussaid dan Sultan Hasanuddin, yang dijuluki "Ayam Jantan dari Timur".

7. Kesultanan Ternate dan Tidore

Berada di Kepulauan Maluku, wilayah ini dikenal sebagai "The Spice Islands" (Kepulauan Rempah). Islam masuk sekitar abad ke-15 melalui perdagangan. Persaingan antara Ternate (pimpinan Sultan Baabullah) dan Tidore sering kali dimanfaatkan oleh bangsa Eropa (Portugis dan Spanyol), namun kedua kerajaan ini tetap menjadi benteng pertahanan Islam di wilayah timur.

Di Maluku, Islam masuk melalui jalur perdagangan rempah sejak abad ke-14. Namun, transformasi menjadi kesultanan yang kokoh terjadi saat persaingan dengan bangsa Eropa (Portugis dan Spanyol) memuncak. Islam di sini menjadi simbol perlawanan (ideologi pembebasan) sekaligus identitas pemersatu bagi suku-suku di wilayah kepulauan yang luas.

8. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan

Pulau Kalimantan, yang dahulu dikenal sebagai daerah transit perdagangan antara Malaka, Jawa, dan Maluku, memiliki sejarah Islamisasi yang unik. Proses pembentukan kerajaan Islam di sini umumnya dipengaruhi oleh hubungan perdagangan dan aliansi politik dengan kesultanan-kesultanan di Jawa (Demak) dan Sulawesi (Gowa-Tallo).

Kesultanan Banjar merupakan kerajaan Islam terbesar di Kalimantan. Pembentukannya menandai berakhirnya pengaruh Hindu di wilayah tersebut. Ada pula Kesultanan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) yang terletak di sepanjang Sungai Mahakam, kerajaan ini merupakan

kelanjutan dari kerajaan tertua di Indonesia (Kutai Martadipura) namun dengan garis keturunan yang berbeda. Islam masuk ke Kutai pada masa pemerintahan **Raja Aji Mahkota** (abad ke-16).

Berbeda dengan Banjar atau Kutai yang berawal dari kerajaan Hindu, Pontianak didirikan langsung sebagai entitas politik Islam. Kerajaan Islam Pontianak didirikan pada tahun **1771** oleh **Syarif Abdurrahman Alkadrie**, putra dari seorang ulama besar asal Arab, Habib Husein Alkadrie. Syarif Abdurrahman membuka lahan di pertemuan tiga sungai (Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar). Karena karisma kepemimpinannya dan jaringan perdagangannya, wilayah ini berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan dakwah di Kalimantan Barat.

Ada pula Kesultanan Sambas (Kalimantan Barat) yang awalnya merupakan wilayah di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit, kemudian menjadi bawahan Kesultanan Banjar dan Sarawak. Islamisasi formal terjadi sekitar abad ke-17. Raden Sulaiman, putra dari Sultan Sarawak (Tengah), pindah ke Sambas dan menikahi putri lokal. Setelah melalui dinamika politik, **Raden Sulaiman** naik takhta pada tahun **1671** dengan gelar **Sultan Muhammad Shafiuddin I**. Ia menjadikan Islam sebagai landasan konstitusi kerajaan, yang kemudian dikenal sebagai salah satu pusat literasi Islam di Kalimantan melalui karya-karya ulamanya.

Selain itu ada pula Kesultanan Paser (Kalimantan Timur) yang terletak di wilayah selatan Kalimantan Timur, berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Islam masuk ke Paser pada awal abad ke-16 melalui dakwah dari pedagang-pedagang asal Jawa dan Sulawesi. Penguasa Paser yang pertama memeluk Islam adalah Putri Diang Ratih, yang menikah dengan seorang bangsawan dari Jawa (Abu Mansyur Indra Jaya). Namun, pengukuhan secara politik terjadi di bawah Sultan Ibrahim Khaliluddin yang secara resmi menggunakan gelar Sultan dan menerapkan hukum Islam.

Selain lima besar di atas, terdapat beberapa kerajaan kecil yang juga bertransformasi menjadi Islam, yaitu Kesultanan Bulungan yang terletak di Kalimantan Utara, terbentuk melalui proses asimilasi budaya antara penduduk lokal (Dayak) dengan pedagang pesisir yang membawa ajaran Islam, Kesultanan Sintang yang awalnya dari kerajaan Hindu-Animisme, mulai memeluk Islam pada masa pemerintahan Abang Pencin yang bergelar Sultan Muhammad Shamsuddin.

Secara umum, proses pembentukan kerajaan Islam di Kalimantan dapat dikategorikan ke dalam tiga jalur: (1) Bantuan Militer & Aliansi: Seperti Banjar yang mendapat bantuan dari Demak. (2) Dakwah Ulama (Top-Down): Seperti di Kutai dan Sambas, di mana raja diislamkan terlebih dahulu oleh ulama pendatang (sufi/sayyid), dan (3) Pendirian Baru (Pionir): Seperti Pontianak yang dibangun dari nol oleh tokoh Muslim.

BAB IV

KESIMPULAN

Pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bukanlah sekadar pergantian agama para penguasa, melainkan sebuah revolusi mental dan kultural yang kompleks. Melalui seleksi nilai-nilai lokal yang diselaraskan dengan ajaran Islam, kerajaan-kerajaan ini berhasil membangun identitas nasional awal yang bersifat inklusif dan kosmopolitan. Sejarah kesultanan-kesultanan ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki akar sebagai bangsa maritim yang terbuka terhadap perubahan global tanpa harus kehilangan jati diri lokalnya.

Pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara merupakan jembatan yang menghubungkan masa kuno (Hindu-Buddha) dengan masa modern Indonesia. Melalui kesultanan-kesultanan ini, integrasi wilayah Nusantara semakin kuat berkat penggunaan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* dan jaringan perdagangan antar-pulau yang dipersatukan oleh iman yang sama. Perlawanan terhadap kolonialisme Barat pun banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh dari kesultanan ini, yang menjadikan Islam sebagai simbol persatuan dan martabat bangsa.

Membahas jumlah kerajaan Islam di Nusantara secara eksak cukup menantang karena jumlahnya mencapai puluhan, mulai dari kesultanan besar hingga kerajaan-kerajaan kecil (*chiefdom*) yang tersebar di wilayah pesisir. Namun, secara historis terdapat sekitar 25 hingga 30 kerajaan Islam utama yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi signifikan.

Di Wilayah Sumatera, wilayah ini adalah gerbang utama Islam di Nusantara karena letaknya yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kerajaan Utama Islam diantaranya Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Malaka (pengaruhnya kuat di pesisir Timur), Kesultanan Siak Sri Indrapura, Kesultanan Jambi, dan Kesultanan Palembang Darussalam. Karakteristiknya yang dominan adalah sebagai Pusat perdagangan internasional dan pusat studi literatur Islam (seperti karya Hamzah Fansuri).

Di Wilayah Jawa, Transisinya menandai runtuhnya dominasi pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Utama Islam diantaranya adalah Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram Islam, dan Kesultanan Pajang. Proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh peran dewan ulama (Wali Songo) yang menggabungkan kekuatan politik dengan dakwah kultural.

Di Wilayah Kalimantan, ada Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Sambas, dan Kesultanan Bulungan. Banyak Kerajaan Islam tersebut terbentuk melalui aliansi politik dengan kerajaan di Jawa atau Sulawesi, serta pengaruh kuat dari para sayyid/keturunan Arab.

Di Wilayah Sulawesi, ada Kesultanan Gowa-Tallo (Makassar), Kesultanan Bone, Kesultanan Buton, dan Kesultanan Luwu. Karakteristiknya Memiliki kekuatan maritim yang luar biasa dan menjadi benteng pertahanan terakhir melawan monopoli perdagangan VOC di wilayah Timur.

Di Wilayah Maluku & Papua, ada Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. (Di Papua juga terdapat pengaruh Islam melalui "Kerajaan Sembilan" di wilayah Onin/Fakfak). Karakteristiknya terkenal sebagai "Spice Islands" (Kepulauan Rempah) yang menyatukan jaringan perdagangan global dengan syiar Islam.

Proses pembentukan kerajaan-kerajaan ini memberikan gambaran tentang dinamika sosial yang sangat cerdas. Pertama, Legitimasi Melalui Agama. Penguasa lokal menggunakan Islam untuk memperkuat legitimasi mereka. Dengan memeluk Islam, raja tidak lagi dianggap sebagai "titisan dewa" yang jauh, melainkan sebagai *Sultan* atau *Khalifatullah* yang mengemban amanah keadilan. Kedua, Perubahan Struktur Ekonomi. Pembentukan kesultanan hampir selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan kota-kota pelabuhan. Islam membawa hukum dagang yang lebih universal (seperti konsep kejujuran dalam timbangan dan larangan riba secara teologis), yang membuat pedagang asing merasa lebih aman bertransaksi. Ketiga, Akulturasi Budaya. Islam tidak menghapus budaya lama secara radikal. Masjid-masjid kuno (seperti Masjid Agung Demak) menggunakan atap tumpang mirip pura, menunjukkan bahwa pembentukan kekuasaan Islam mengedepankan harmoni daripada konfrontasi.

Dari sejarah panjang pembentukan kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara ini, kita dapat memetik beberapa hikmah penting bagi kehidupan berbangsa saat ini, yaitu Pentingnya Diplomasi dan Persatuan, Moderasi Beragama (Wasathiyah), Kemandirian Ekonomi, dan Pendidikan sebagai Pilar Kekuasaan. (*)

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Allen & Unwin and University of Hawai'i Press.

Ricklefs, M.C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave Macmillan.

Vlekke, B.H.M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Lombard, Denys. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya (Bagian II: Jaringan Asia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Reid, Anthony. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Volume 2, Expansion and Crisis*. Yale University Press.

Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Jilid 1)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.